

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan  
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0	Harian Umum	Online	Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo
---	---	---	---	-------------	--------	-----------------------------------

*Harian*  
**RAKYAT GORONTALO**  
*Paling Paham Gorontalo*

**INN**  
Terverifikasi Faktual  
Dewan Pers  
No: 357/DP-Terverifikasi/KW/2019

JUMAT, 05 JUNI 2020

Eceran Rp. 4.000



GUBERNUR Rusli Habibie didampingi Wagub Idris Rahim, saat mengikuti paripurna melalui video conference di aula rujab gubernur. (f.hms/salman)

# Pemprov Raih WTP Tujuh Kali Beruntun

GORONTALO (RAGORO) - Kabar baik ditengah pandemi Covid 19. Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatatkan rekor opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut.

Opini dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diraih secara konsisten dari tahun 2013 hingga tahun

↳ Baca BERUNTUN...Hal 2



## BERUNTUN...

■ Sambungan dari Hal 1

2019.

Penyampaian hasil tersebut raihan WTP dibacakan langsung oleh anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz dalam Rapat Paripurna DPRD melalui aplikasi webinar, Kamis (4/6) kemarin, dimana Gubernur Rusli Habibie didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama jajaran kepala OPD, mengikutinya dari aula Rumah Jabatan Gubernur.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang sekaligus merupakan penca-

paian WTP yang ke tujuh,” kata Azhar Aziz.

Lebih lanjut Azhar Aziz menambahkan, pencapaian WTP berturut-turut ini menunjukkan, keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, diantaranya melalui rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemprov Gorontalo, atas kualitas laporan keuangan yang menjadi semakin baik.

“Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peratu-

ran perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” tambahnya.

Sementara itu Gubernur Rusli Habibie menyambut baik pencapaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Alhamdulillah kita diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi kita juga masih diberi beberapa catatan perbaikan oleh BPK RI, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang sudah kita sepakati bersama.

Perbaikan tersebut dalam hal penguasaan sistem sehingga tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian

hari,” tutur Rusli.

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TP TGR, serta mendorong peran inspektorat, Badan Keuangan dan OPD untuk percepatan penyelesaian TLHP 60 hari sejak laporan dikeluarkan. LKPD yang dikaji secara umum terdiri dari tujuh jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (mey-25)